



Dampak Perubahan Kebijakan Pengadaan Secara Elektronik melalui E-Katalog V5 Menjadi V6 bagi Penyedia di Kecamatan Balongbendo

Prasetyo Dwi Pangesti Adji^{1*}, Sri Kamariyah², Zainal Fatah³

¹⁻³Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

*Penulis korespondensi: prasdpangestia@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of procurement of goods and services through e-Catalog version 6 in Balongbendo District after the enactment of policy changes from the previous version (V5). In addition, this study also identifies impacts, obstacles, and strategies to increase system effectiveness. This study uses a qualitative descriptive method with a document study approach based on the Electronic Procurement of Goods/Services Implementation Report for the third quarter of 2025 as a secondary data source. The results of this study show that the implementation of the V6 e-Catalog has been relatively effective with a completion rate of 87.18% of a total of 39 procurement packages. However, obstacles were found in the form of human error (75%) and system bugs (25%) that caused some packages to be unable to be processed. The transition from version 5 to version 6 brings a positive impact in terms of increased transparency and efficiency, but it also poses new challenges in adapting to the latest version. This study confirms that the success of digital transformation of public procurement does not only depend on technological aspects, but also on human readiness and adaptive institutional governance.*

Keywords: *Digital Transformation; eKatalog V6; Electronic Procurement; Human Error; System Effectiveness*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog versi 6 di Kecamatan Balongbendo setelah diberlakukannya perubahan kebijakan dari versi sebelumnya (V5). Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi dampak, kendala, dan strategi peningkatan efektivitas sistem. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi dokumen berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Triwulan III Tahun 2025 sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan e-Katalog V6 telah berjalan relatif efektif dengan tingkat penyelesaian mencapai 87,18% dari total 39 paket pengadaan. Namun demikian, ditemukan kendala berupa human error (75%) dan bug sistem (25%) yang menyebabkan sebagian paket tidak dapat diproses. Transisi dari versi 5 ke versi 6 membawa dampak positif berupa peningkatan transparansi dan efisiensi, akan tetapi juga menimbulkan tantangan baru untuk beradaptasi dengan versi terbaru. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital pengadaan publik tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga pada kesiapan manusia dan tata kelola kelembagaan yang adaptif.

Kata kunci: Efektivitas Sistem; e-Katalog V6; Human Error; Pengadaan Elektronik; Transformasi Digital

1. PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Wibowo, 2022, Sari *et al.*, 2022). Hal ini karena mencakup pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan efisien (Sitorus *et al.*, 2025). Melalui sistem pengadaan yang baik, pemerintah mampu memastikan bahwa setiap belanja publik memberikan nilai manfaat yang efisien bagi Masyarakat (Akbar and Syamsir, 2024; Setiawan *et al.*, 2024). Pengadaan barang atau jasa tidak hanya dipandang sebagai kegiatan administratif, tetapi bagian dari strategi Pembangunan yang menuntut profesionalisme, keterbukaan, dan integritas aparatur negara (Siregar, 2008).

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam tata kelola pengadaan pemerintah (Tanaamah *et al.*, 2021). Salah satu bentuk transformasi digital tersebut

adalah penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Melalui sistem E-Katalog, proses pengadaan menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diawasi (Ariza, 2024; Faniyah *et al.*, 2024). E-Katalog berfungsi sebagai etalase elektronik yang menampilkan daftar produk, spesifikasi, harga, serta penyedia yang telah terverifikasi (Dewi *et al.*, 2025). Hal ini dapat memastikan bahwa seluruh proses pembelian dapat dilakukan secara transparan tanpa interaksi langsung antara pengguna dan penyedia.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, LKPP melakukan penyempurnaan melalui pembaruan dari E-Katalog Versi 5 (V5) menjadi E-Katalog Versi 6 (V6). Pembaruan ini merupakan bagian dari strategi nasional transformasi digital pengadaan. Hal ini sejalan dengan kebijakan percepatan pelaksanaan belanja pemerintah berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya. Perubahan versi ini mencakup berbagai aspek teknis dan manajerial, seperti perbaikan antarmuka pengguna, integrasi data lintas kementerian/lembaga, peningkatan fitur pencarian dan kurasi produk, serta sistem keamanan dan monitoring transaksi yang lebih kuat (Laporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kecamatan Balongbendo Triwulan III, 2025).

Perubahan system dari V5 ke V6 tentunya tidak berjalan mulus dan menghadapi beberapa kendala, terutama pada tingkat pelaksana di daerah. Kecamatan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan sebagian kegiatan pengadaan melalui e-Katalog, termasuk berkoordinasi dengan penyedia barang atau jasa lokal (Ramadhani & Nurcahyanto, 2024; Oktaviranti, 2025). Pada praktek lapang, transisi menuju E-Katalog V6 menimbulkan berbagai tantangan, mulai dari kendala teknis aplikasi, perbedaan prosedur, hingga adaptasi pengguna baik dari sisi pejabat pengadaan maupun pihak penyedia (Laporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kecamatan Balongbendo Triwulan III, 2025).

Kecamatan Balongbendo merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan Balongbendo menjadi salah satu contoh nyata bagaimana perubahan kebijakan ini berdampak langsung terhadap proses pengadaan di tingkat pelaksana. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Triwulan III Tahun 2025, tercatat bahwa sebagian besar kegiatan pengadaan telah menggunakan e-Katalog V6, dengan nilai transaksi mencapai Rp229.646.511 atau sekitar 12% dari total DPA Kecamatan sebesar Rp1,9 miliar. Meski capaian ini menunjukkan komitmen terhadap digitalisasi pengadaan, masih ditemukan sejumlah kendala dalam implementasi sistem baru tersebut (Laporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kecamatan Balongbendo Triwulan III, 2025).

Berdasarkan pemaparan diatas, kajian terhadap dampak perusahaan kebijakan E-Katalog V5 ke V6 menjadi penting dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini menetapkan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog V6 di Kecamatan Balongbendo setelah diberlakukannya perubahan kebijakan dari versi sebelumnya?
- b. Apa saja dampak yang dirasakan penyedia barang atau jasa local terhadap penerapan system E-Katalog V6 dibandingkan V5?
- c. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dan tantangan dalam proses adaptasi penyedia terhadap perubahan kebijakan ini?
- d. Strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengadaan elektronik melalui E-Katalog versi terbaru?

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman empiris dan analitis terkait perubahan kebijakan pengadaan barang atau jasa melalui system E-Katalog. Studi ini diharapkan mampu memberikan Gambaran empiris mengenai efektivitas implementari kebijakan E-Katalog terbaru. Penelitian ini juga diharapkan memiliki nilai strategis dalam memperkuat kebijakan nasional terkait digitalisasi pengadaan barang atau jasa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, karena melalui kegiatan ini pemerintah dapat menyediakan kebutuhan publik secara efektif, efisien, dan berkelanjutan (Setiawan *et al.*, 2024; Pudjijono & Nursani, 2022). Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pengadaan diartikan sebagai kegiatan untuk memperoleh barang, jasa, atau pekerjaan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, atau institusi lain yang menggunakan dana APBN/APBD. Tujuannya adalah untuk mendukung peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah (Valentina, 2024; Nurhikmahyanti, 2024).

Secara prinsip, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan asas efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel (Ibrahim & Phahlevy, 2024). Prinsip-prinsip tersebut menuntut agar setiap proses pengadaan dilakukan dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang transparan, serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral (Arsana, 2016). Oleh karena itu, pengadaan

barang dan jasa bukan hanya kegiatan administratif, tetapi juga merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Ansari, 2016; Sholeh *et al.*, 2023).

Dalam konteks modernisasi birokrasi, pemerintah Indonesia telah mengadopsi pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) untuk memperkuat akuntabilitas dan mengurangi potensi penyimpangan dalam proses lelang konvensional. Implementasi sistem ini dikoordinasikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang berperan mengembangkan kebijakan, standar, dan sistem teknologi informasi pengadaan nasional. Salah satu inovasi penting LKPP adalah penerapan e-Katalog, yaitu sistem elektronik berbasis marketplace yang memungkinkan satuan kerja pemerintah untuk memilih barang atau jasa secara langsung dari penyedia yang telah terverifikasi melalui mekanisme online (Pamungkas, 2025; Pebrianti & Maesaroh, 2025).

Melalui e-Katalog, proses pengadaan menjadi lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Setiap transaksi dapat dilacak melalui sistem, sehingga meminimalkan peluang kolusi dan mark-up harga. Selain itu, sistem ini juga memberikan peluang lebih besar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah. Dengan kemudahan akses, penyederhanaan proses administrasi, serta penghapusan hambatan geografis, e-Katalog menjadi alat strategis untuk memperkuat inklusivitas ekonomi daerah.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan pengadaan elektronik sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia (baik pejabat pengadaan maupun penyedia), infrastruktur teknologi, dan stabilitas sistem yang digunakan (Muharram *et al.*, 2025). Tantangan utama dalam penerapan pengadaan elektronik di daerah mencakup keterbatasan jaringan internet, dan adaptasi terhadap perubahan regulasi yang dinamis (Rafid & Nurita, 2025; Syarifuddin *et al.*, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pengadaan bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja birokrasi.

Kerangka Konseptual Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini mengacu pada Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989), yang menjelaskan bahwa penerimaan pengguna terhadap teknologi baru dipengaruhi oleh dua konstruk utama: *perceived usefulness* (persepsi kemanfaatan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan). Dalam konteks e-Katalog V6, *perceived usefulness* tercermin dari sejauh mana pengguna (PPK dan penyedia) menilai bahwa sistem baru meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas proses pengadaan. Sementara itu, *perceived ease of use* menggambarkan tingkat kemudahan

pengguna dalam beradaptasi dengan fitur-fitur baru, seperti validasi otomatis, integrasi INAPROC, dan mekanisme kurasi digital.

Selain TAM, penelitian ini juga menggunakan pendekatan Diffusion of Innovation (DOI) yang diperkenalkan oleh Rogers (2003) untuk menjelaskan proses penyebaran inovasi dalam suatu sistem sosial. Menurut teori ini, keberhasilan adopsi inovasi dipengaruhi oleh lima atribut utama, yaitu: (1) relative advantage, (2) compatibility, (3) complexity, (4) trialability, dan (5) observability. Dalam konteks implementasi e-Katalog V6, relative advantage berkaitan dengan manfaat tambahan dibandingkan versi sebelumnya, seperti peningkatan efisiensi transaksi dan penyederhanaan administrasi. Compatibility menilai sejauh mana sistem baru selaras dengan prosedur kerja yang telah ada di instansi. Complexity berkaitan dengan tingkat kesulitan penggunaan sistem, sementara trialability dan observability menunjukkan sejauh mana pengguna dapat mencoba dan mengamati hasil penerapan inovasi secara langsung.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai dampak perubahan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dari E-Katalog versi 5 (V5) menjadi E-Katalog versi 6 (V6) terhadap penyedia di Kecamatan Balongbendo. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali persepsi, pengalaman, dan dinamika adaptasi (Kosasih *et al.*, 2024). Sifat deskriptif memungkinkan peneliti menyajikan gambaran sistematis tentang proses, dinamika, serta implikasi kebijakan berbasis bukti dokumen, tanpa melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara atau survey (Tahir *et al.*, 2023). Selain itu, penelitian ini juga memiliki unsur studi kasus (case study) karena berfokus pada satu lokasi spesifik, yaitu Kecamatan Balongbendo, sebagai representasi implementasi kebijakan e-Katalog di tingkat pemerintah daerah.

Penelitian dilakukan di Kecamatan Balingbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Balongbendo merupakan salah satu kecamatan pelaksana pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui e-Katalog. Waktu penelitian mencakup periode Triwulan III Tahun 2025, sesuai dengan laporan pelaksanaan pengadaan elektronik yang menjadi sumber utama data sekunder penelitian.

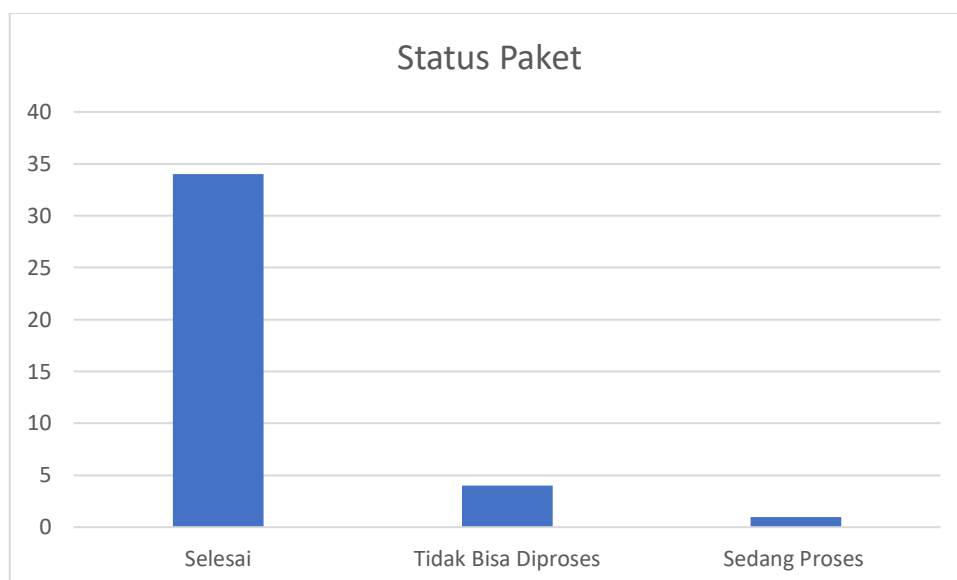
Data yang digunakan pada penelitian ini Adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber pertama (responden), akan tetapi melalui hasil dokumentasi, laporan, atau publikasi pihak lain yang telah lebih dahulu mengumpulkan dan mengolah informasi tersebut (Haifa *et al.*, 2025). Data sekunder diperoleh

dari dokumen resmi pelaksanaan pengadaan elektronik Triwulan III Tahun 2025 Kecamatan Balongbendo, peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa, surat edaran dan pedoman teknis tentang implementasi E-Katalog V6, serta literatur akademik mengenai *e-procurement*, dan transformasi digital sektor publik. Data sekunder dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan dan evaluasi implementasi sistem elektronik yang telah terdokumentasi dengan baik dalam laporan resmi. Oleh karena itu, peneliti tidak melakukan interaksi langsung dengan responden, melainkan menganalisis informasi yang sudah ada secara sistematis.

Pengumpulan data dilakukan sepenuhnya melalui studi kepustakaan dan telaah dokumen (*desk study*). Langkah ini mencakup pengumpulan, pembacaan kritis, dan penataan dokumen ke dalam kategori tematik yang relevan dengan tujuan penelitian (Hidayat *et al.*, 2025; Rusli *et al.*, 2025). Seluruh informasi diekstraksi apa adanya dari dokumen resmi, termasuk tabel rekapitulasi paket, catatan kendala, dan rekomendasi perbaikan yang tercantum dalam laporan, kemudian disandingkan dengan ketentuan regulatif untuk memaknai temuan dalam bingkai kebijakan publik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Balongbendo merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo yang telah menerapkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berdasarkan laporan pelaksanaan pengadaan Triwulan III Tahun 2025, total pagu anggaran Kecamatan Balongbendo mencapai Rp1.906.618.846, dengan realisasi pengadaan melalui e-Katalog sebesar Rp229.646.511 atau sekitar 12% dari total DPA. Pelaksanaan pengadaan melalui e-Katalog didominasi oleh kategori belanja modal, peralatan kantor, dan jasa perawatan aset daerah. Tercatat sebanyak 39 paket pengadaan dilaksanakan melalui sistem E-Katalog Versi 6 (V6), dengan komposisi 34 paket selesai, 4 paket gagal, dan 1 paket masih dalam proses pelaksanaan (Laporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kecamatan Balongbendo Triwulan III, 2025). Gambar 1 berikut merupakan status paket pengadaan pada laporan triwulan III tahun 2025 Kecamatan Kedungbendo, Kabupaten Sidoarjo.



Gambar 1. Status Paket Pengadaan Barang/Jasa Kecamatan Balongbendo Triwulan III Tahun 2025.

Sumber: Laporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kecamatan Balongbendo Triwulan III Tahun 2025.

Perubahan kebijakan dari E-Katalog Versi 5 (V5) ke Versi 6 (V6) mulai diberlakukan. Balongbendo termasuk wilayah yang langsung beradaptasi dengan sistem baru tersebut sejak awal 2025. Secara umum, implementasi e-Katalog V6 menunjukkan peningkatan dalam efisiensi proses, transparansi, serta kemudahan pelacakan transaksi (Rakhman, 2024; Palinrungi, 2024). Namun, di sisi lain, perubahan ini juga memunculkan beberapa kendala teknis dan administratif bagi penyedia maupun pejabat pengadaan. Transisi dari E-Katalog V5 ke V6 di Balongbendo menggambarkan perubahan signifikan baik dari sisi sistem maupun perilaku pengguna. Versi terbaru ini menghadirkan berbagai pembaruan, antara lain integrasi data yang lebih baik, proses transaksi yang lebih sederhana, fitur pencarian dan penyaringan produk yang lebih cepat, serta peningkatan keamanan sistem.

Dengan adanya perubahan ini, seluruh instansi pemerintah, termasuk perangkat daerah di tingkat kecamatan, diwajibkan untuk beradaptasi dan menerapkan sistem baru tersebut dalam kegiatan pengadaannya. Namun, beberapa PPK dan penyedia mengaku masih menghadapi kesulitan pada tahap awal adaptasi. Selain itu, pihak penyedia juga mengalami beberapa kendala. Dari 39 paket pengadaan yang dilaksanakan, terdapat 4 paket yang gagal dan mengalami kendala. Tabel 1 berikut merupakan rincian jenis kegagalan yang dialami saat proses pengadaan barang atau jasa di Kecamatan Kedungbendo, Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1. Klasifikasi Jenis Kendala Paket Tidak Dapat Diproses.

No	Jenis Kendala	Jumlah Kasus	Persentase
1	Human Error (kesalahan manusia)	3 Paket	75%
2	Bug Sistem	1 Paket	25%
Total		\$ Paket	100%

Sumber: Laporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kecamatan Balongbendo Triwulan III Tahun 2025.

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari total 4 paket yang tidak dapat diproses pada TW III, 75% (3 paket) disebabkan oleh Human Error dan 25% (1 paket) oleh Bug Sistem. Dengan total paket sebanyak 39, tingkat kegagalan proses mencapai sekitar 10,26% (4/39). Dominasi kesalahan manusia mengindikasikan bahwa faktor prosedural dan ketelitian operasional masih menjadi titik lemah utama dibandingkan kendala murni teknis.

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa kesalahan terbesar Adalah dari kesalaham manusia. Disisi lain, sistem V6 merupakan system yang baru diluncurkan setelah sistem v5. Oleh karena itu, fokus perbaikan pada triwulan berikutnya harus diarahkan terutama pada aspek proses dan kompetensi pengguna, tanpa mengabaikan penyempurnaan teknis sistem. Dominasi human error menunjukkan bahwa kegagalan lebih banyak terjadi pada tahap verifikasi (jumlah barang, nominal/pembulatan, kelengkapan dokumen) dibandingkan kegagalan arsitektur aplikasi. Dengan kombinasi peningkatan disiplin proses dan penyempurnaan fitur validasi, proporsi paket “tidak dapat diproses” sangat mungkin turun signifikan pada periode berikutnya. Hal ini sekaligus mempercepat transisi dari e-Katalog V5 ke V6 yang lebih andal dan akuntabel.

Tabel 2. Rincian Paket dan Status Pengadaan.

No.	Nama Paket	Penyedia	Status
1	PAKET 1	Penyedia A	Selesai
2	PAKET 2	Penyedia A	Selesai
3	PAKET 3	Penyedia A	Selesai
4	PAKET 4	Penyedia A	Selesai
5	PAKET 5	Penyedia B	Selesai
6	PAKET 6	Penyedia C	Selesai
7	PAKET 7	Penyedia D	Selesai
8	PAKET 8	Penyedia C	Selesai
9	PAKET 9	Penyedia C	Selesai
10	PAKET 10	Penyedia E	Selesai
11	PAKET 11	Penyedia E	Selesai
12	PAKET 12	Penyedia E	Selesai
13	PAKET 13	Penyedia B	Selesai
14	PAKET 14	Penyedia B	Selesai
15	PAKET 15	Penyedia B	Selesai
16	PAKET 16	Penyedia B	Selesai
17	PAKET 17	Penyedia B	Tidak bisa dibayar (kurang teliti jumlah barang)
18	PAKET 18	Penyedia F	Paket tidak dapat diproses (bug sistem)
19	PAKET 19	Penyedia G	Selesai

20	PAKET 20	Penyedia B	Selesai
21	PAKET 21	Penyedia G	Selesai
22	PAKET 22	Penyedia B	Selesai
23	PAKET 23	Penyedia H	Tidak bisa diproses pembayaran (selisih pembulatan)
24	PAKET 24	Penyedia I	Selesai
25	PAKET 25	Penyedia E	Selesai
26	PAKET 26	Penyedia J	Selesai
27	PAKET 27	Penyedia I	Selesai
28	PAKET 28	Penyedia H	Selesai
29	PAKET 29	Penyedia G	Selesai
30	PAKET 30	Penyedia E	Selesai
31	PAKET 31	Penyedia E	Selesai
32	PAKET 32	Penyedia J	Tidak bisa dibayar (kurang teliti jumlah barang)
33	PAKET 33	Penyedia I	Selesai
34	PAKET 34	Penyedia I	Selesai
35	PAKET 35	Penyedia I	Selesai
36	PAKET 36	Penyedia B	Selesai
37	PAKET 37	Penyedia I	Dalam proses pembayaran
38	PAKET 38	Penyedia I	Selesai
39	PAKET 39	Penyedia I	Selesai

Sumber: Laporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kecamatan Balongbendo Triwulan III Tahun 2025.

Tabel 2 merupakan rincian detail jenis paket, pihak penyedia dan status pengadaan. Seluruh informasi paket di samarkan untuk memenuhi prinsip etika penelitian dan perlindungan data pada laporan pengadaan barang/jasa pemerintah. Setiap penyedia diberi kode alfabet (Penyedia A, B, C, dan seterusnya) untuk memastikan analisis tetap objektif tanpa mengungkapkan identitas individu atau badan usaha tertentu. Ditinjau dari penyedia, kinerja penyedia A, C, E dan G konsisten tanpa kegagalan. Penyedia A menyelesaikan 4 paket dari 4 paket yang dilaksanakan. Penyedia E menyelesaikan 4 paket dari 4 paket yang dilaksanakan. Sementara itu, Penyedia C dan G menyelesaikan 3 paket dari 3 paket yang dilaksanakan. Penyedia I menyelesaikan 7 paket dari 8 paket yang dilaksanakan. Sementara itu, 1 paket masih dalam proses dari Penyedia I. Penyedia B mencatat satu kegagalan karena human error. Sementara itu, Penyedia H dan J masing-masing mengalami satu kegagalan yang kembali menegaskan lemahnya kontrol dokumen dan ketelitian verifikasi, dan Penyedia F menghadapi satu kegagalan murni teknis (bug).

Dengan kombinasi disiplin proses dan penyempurnaan fitur validasi, proporsi paket “tidak bisa diproses” sangat mungkin menurun pada periode berikut, mempercepat pematangan implementasi e-Katalog V6. Oleh karena itu, kendala dan masukan dari penyedia merupakan hal penting untuk dilakukan. Pemerintah Kecamatan Balongbendo telah mengumpulkan beberapa kendala dan masukan dari Penyedia. Hal ini akan menggambarkan menjadi dasar perbaikan kebijakan dan prosedur operasional pada triwulan berikutnya. Dengan demikian,

kendala yang berulang dapat ditangani secara preventif, rekomendasi penyedia terakomodasi secara terukur, dan implementasi e-Katalog V6 semakin matang, andal, serta akuntabel. Tabel 3 merupakan kendala dan masukan yang ungkapkan oleh penyedia barang atau jasa di Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3. Rincian Kendala dan Masukan dari Penyedia.

No	Penyedia	Kendala dan Masukan
1	Penyedia A	<i>“Agar versi V5 tetap dijalankan secara paralel selama periode transisi sampai semua fitur di V6 stabil dan seluruh penyedia siap beradaptasi.”</i>
2	Penyedia B	<i>“Proses penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang lama karena bug pada aplikasi dan proses kurasi yang lambat. Diperlukan perbaikan sistem.”</i>
3	Penyedia C	<i>“Aplikasi kurang fleksibel karena tidak dapat menambahkan potongan pajak pada pengadaan jasa, padahal penyedia merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP).”</i>
4	Penyedia D	<i>“Proses pencairan yang lama, lebih dari empat minggu, sangat membebani penyedia. Diperlukan perbaikan mekanisme pembayaran.”</i>
5	Penyedia E	<i>“Masa transisi dari versi 5 ke versi 6 memerlukan adaptasi, terutama terkait penggunaan akun INAPROC, verifikasi profil penyedia, dan pembaruan data produk.”</i>
6	Penyedia F	<i>“Penyedia berharap ada kejelasan lebih lanjut terkait penyempurnaan mekanisme kurasi produk (termasuk TKDN dan SNI), agar produk yang tayang memenuhi standar dan tidak ada produk yang tayang dengan informasi menyesatkan atau tidak lengkap.”</i>
7	Penyedia G	<i>“Penyedia berharap adanya dukungan teknis, layanan pelanggan, dan troubleshooting jika mengalami kendala teknis di sistem baru (login, verifikasi, akses, dan sinkronisasi INAPROC).”</i>
8	Penyedia H	<i>“Terdapat kendala pada proses pembayaran karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kurang teliti. PPK perlu lebih cermat saat verifikasi.”</i>
9	Penyedia I	<i>“Penyedia lokal atau UMKM berharap bahwa e-Katalog V6 terus memudahkan partisipasi mereka, terutama dalam hal verifikasi, pembayaran, dan persyaratan administrasi yang lebih sederhana.”</i>
10	Penyedia J	<i>“Terdapat kendala pada proses pembayaran karena PPK kurang teliti dalam memeriksa dokumen transaksi.”</i>

Sumber: Laporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kecamatan Balongbendo Triwulan III Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 2 dan umpan balik penyedia, terlihat bahwa tantangan terbesar terletak pada masa transisi dan stabilisasi sistem baru. Beberapa penyedia menekankan pentingnya menjalankan versi V5 secara paralel dengan V6 hingga semua fitur baru benar-benar stabil. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem digital memerlukan strategi adaptasi bertahap agar tidak mengganggu kelancaran transaksi dan pelayanan publik.

Kendala lain yang banyak disebut adalah bug sistem, proses kurasi produk yang lambat, serta keterlambatan pencairan pembayaran. Masalah-masalah ini menandakan bahwa readiness

infrastruktur digital dan koordinasi antar-aktor (PPK, penyedia, dan LKPP) masih perlu diperkuat. Dalam konteks administrasi publik, situasi ini menggambarkan pentingnya tata kelola sistem informasi pemerintah yang adaptif, dengan prosedur evaluasi dan umpan balik berkelanjutan. Akhirnya, aspirasi dari penyedia lokal dan UMKM agar e-Katalog V6 tetap inklusif menunjukkan nilai strategis sistem ini dalam mendorong pemerataan ekonomi daerah. Dengan demikian, pembelajaran dari fase awal implementasi V6 dapat digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan.

5. KESIMPULAN DAN BATASAN MASALAH

Laporan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Kecamatan Balongbendo Triwulan III Tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan pengadaan melalui e-Katalog V6 di Kecamatan Balongbendo telah berjalan relatif baik dengan tingkat penyelesaian mencapai 87,18% dari total 39 paket. Hal ini menunjukkan bahwa transisi dari versi sebelumnya (V5) ke V6 dapat diimplementasikan secara operasional, meskipun masih ditemui beberapa hambatan teknis dan administratif. V6 memberikan tata kelola transaksi yang lebih transparan dan terintegrasi, namun membutuhkan penyesuaian pada sisi pengguna, baik PPK maupun penyedia.

Dampak yang dirasakan penyedia lokal cenderung bersifat campuran (mixed impact). Di satu sisi, penyedia mengakui bahwa sistem V6 menawarkan kemudahan akses, kecepatan proses, dan kontrol digital yang lebih baik. Namun di sisi lain, masa transisi menimbulkan kesulitan adaptasi, terutama terkait login, sinkronisasi akun INAPROC, verifikasi profil, serta keterlambatan proses pembayaran. Penyedia lokal juga menyoroti perlunya fleksibilitas fitur, seperti pengaturan potongan pajak bagi penyedia PKP dan kejelasan kurasi produk berbasis TKDN serta SNI.

Faktor utama kendala dan tantangan dalam adaptasi kebijakan V6 terdiri atas dua kategori besar, yakni human error (75%) dan kendala teknis sistem (25%). Human error umumnya muncul akibat kurang teliti dalam verifikasi jumlah barang, dokumen transaksi, serta kesalahan pembulatan nominal saat pembayaran. Kendala teknis terutama terkait bug sistem, lambatnya proses kurasi, dan belum optimalnya layanan dukungan teknis.

Efektivitas pelaksanaan e-Katalog V6 dapat ditingkatkan melalui penguatan kapasitas SDM dengan pelatihan teknis singkat dan micro-learning, disertai penyempurnaan fitur sistem seperti validasi otomatis, peringatan pembulatan, serta perbaikan bug dan kurasi produk. Kombinasi keduanya akan mempercepat adaptasi pengguna dan menurunkan risiko kegagalan proses pengadaan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan pengadaan barang/jasa elektronik Triwulan III Tahun 2025, sehingga analisis hanya mencerminkan kondisi pada periode tertentu dan belum menggambarkan dinamika jangka panjang. Penelitian ini tidak melakukan wawancara langsung dengan penyedia atau pejabat pengadaan, sehingga perspektif interpretatif dan persepsi pengguna terhadap sistem diperoleh dari data dokumentasi dan laporan resmi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog V6 di Kecamatan Balongbendo. Berikut merupakan saran yang dapat dikemukakan oleh penelitian ini.

Disarankan bagi pemerintah Kecamatan Balongbendo untuk melakukan evaluasi rutin terhadap proses pengadaan berbasis e-Katalog dan identifikasi akar penyebabnya. Selain itu, disarankan pula untuk mengadakan pelatihan secara rutin bagi pejabat pengadaan dan penyedia lokal, guna meningkatkan pemahaman teknis serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan sistem e-Katalog V6.

Bagi penyedia barang/jasa disarankan untuk aktif mengikuti pelatihan serta memberikan umpan balik konstruktif mengenai fitur dan kebijakan baru agar sistem dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha daerah.

Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna mengukur pengaruh langsung perubahan kebijakan terhadap efisiensi waktu, biaya transaksi, dan kepuasan penyedia, baik di tingkat kecamatan lain maupun lintas kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, W. S., & Syamsir, S. (2024). Reformasi sistem penganggaran dan pengadaan barang dan jasa (procurement) Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat. *Jurnal Publik*, 18(2), 83–95.
- Ansari, M. I. (2016). Penerapan pakta integritas pada pengadaan barang/jasa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(3).
- Ariza, D. (2024). E-Katalog: Langkah strategis pemerintah dalam memerangi fraud pengadaan barang dan jasa. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 20–29.
- Arsana, I. P. J. (2016). *Manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah*. Deepublish.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 319–340.

- Dewi, N. L. V. C., Yudartha, I. P. D., & Lukman, J. P. (2025). Kinerja unit pengadaan barang dan jasa dalam meningkatkan e-government melalui e-katalog UMKM lokal di Kabupaten Badung. *Socio-political Communication and Policy Review*, 2(1).
- Faniyah, I., Pratama, B. P., & Yendri, N. (2024). Penggunaan sistem e-Katalog dalam pengadaan pekerjaan konstruksi proyek pemerintah dalam perspektif hukum persaingan usaha. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 417–426.
- Haifa, N. M., Nabilla, I., Rahmatika, V., Hidayatullah, R., & Harmonedi, H. (2025). Identifikasi variabel penelitian dan jenis sumber data dalam penelitian pendidikan. *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan dan Bahasa*, 2(2), 256–270.
- Hidayat, R., Fitri, R. A., & Hermina, D. (2025). Langkah penelitian manajemen pendidikan: Penemuan masalah, telaah pustaka, persiapan penelitian, pengumpulan data, analisis data, penyimpulan/ pemaknaan, dan pelaporan & evaluasi penelitian. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(6), 509–523.
- Ibrahim, D., & Phahlevy, R. R. (2024). Implementasi prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa di BUMDes. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 19.
- Kosasih, O., Hidayat, K., Hutahayan, B., & Sunarti. (2024). Developing sustainable business-to-business (B2B) strategies in service innovation for enhancing customer loyalty in the petrochemical industry: A systematic review. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2422564.
- Laporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kecamatan Balongbendo Triwulan III. (2025). *Laporan tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik menggunakan Katalog V6 selama tiga triwulan di Kecamatan Balongbendo* [Laporan internal tidak dipublikasikan]. Sidoarjo, Indonesia.
- Muharram, M., Hariyati, D., & Simanjuntak, L. R. (2025). Efisiensi dan efektivitas pengadaan barang/jasa (e-procurement) pada LPSE dan e-katalog di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(3), 1547–1559.
- Nurhikmahyanti, D. (2024). Strategi pengembangan sumber daya pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan daya saing Indonesia: Tinjauan terhadap kebijakan dan implementasi manajemen. *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa*, 3(2), 46–57.
- Oktaviranti, S. A. (2025). Implementasi e-purchasing dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di OPD Kecamatan Prigen. *MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik)*, 8(1), 68–84.
- Palinrungi, M. K. A. (2024). Analisis pangsa pasar dan peluang pengembangan katalog elektronik pemerintah versi 6 dalam era transformasi e-commerce Indonesia. *Jurnal Pengadaan Indonesia*, 3(2), 91–99.
- Pamungkas, D. P. A. (2025). *Evaluasi pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-katalog Perda Kabupaten Purworejo* (Disertasi doktor, Universitas Islam Indonesia).
- Pebrianti, P., & Maesaroh, M. (2025). Implementasi kebijakan e-Katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 14(2), 314–328.
- Pudjijono, A., & Nursani, D. (2022). Indikator pengadaan barang/jasa berkelanjutan pada pembangunan bendungan. *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa*, 1(1), 73–85.

- Rafid, R., & Nurita, R. F. (2025). Dinamika pendidikan dan hukum di era digital: Tantangan dan peluang dalam menghadapi transformasi teknologi. *MLJ Merdeka Law Journal*, 6(1).
- Rakhman, A. A. (2024). Analisis pangsa pasar dan peluang pengembangan katalog elektronik pemerintah versi 6 dalam era transformasi e-commerce Indonesia. *Jurnal Pengadaan Indonesia*, 3(2), 69–77.
- Ramadhani, D., & Nurcahyanto, H. (2024). Implementasi e-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(1), 1–23.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Rusli, A., Fadhil, M., Ishaq, M., Hidayatullah, R., & Harmonedi, H. (2025). Strategi pengumpulan dan pengelolaan data dalam penelitian pendidikan: Kajian teoretis dan praktis. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 573–581.
- Sari, R. D., Nasution, F. A., Nasution, M., & Yamin, M. Y. M. (2022). Penerapan tata kelola good governance terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Warta Dharmawangsa*, 16(3), 471–486.
- Setiawan, D. B., Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). Peningkatan efisiensi dan transparansi melalui sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik di sektor publik. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1613–1623.
- Sholeh, M., Widjajanti, K., & Lestari, R. I. (2023). Penerapan good governance pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 16(3), 266–279.
- Siregar, M. A. (2008). *Penerapan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintahan Provinsi Bengkulu* (Disertasi doktor, Universitas Diponegoro).
- Sitorus, L., Sitompul, S. A., Kamila, N. F., & Pangestoeti, W. (2025). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. *Economic Reviews Journal*, 4(1), 235–244.
- Syarifuddin, S., Din, T., Andriani, T., Vanchapo, A. R., Tinambunan, H. S. R., & Sawlani, D. K. (2024). Reformasi hukum di era digital: Tantangan dan peluang di Indonesia. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 3206–3215.
- Tahir, R., Kalis, M. C. I., Thamrin, S., Rosnani, T., Suharman, H., Purnamasari, D., ... Sulaeman, M. K. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif: Mengumpulkan bukti, menyusun analisis, mengkomunikasikan dampak*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tanaamah, A. R., Wijaya, A. F., & Maylinda, S. A. (2021). Tata kelola teknologi informasi pada sektor publik: Penyelarasan teknologi informasi dengan visi kepemimpinan. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 8(6), 1–12.
- Valentina, V. (2024, September). Analisis etika dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)* (Vol. 6, pp. 656–661).
- Wibowo, R. A. (2022). *Tata kelola pemerintahan yang baik dan pengadaan barang jasa pemerintah: Pendekatan perbandingan hukum*. UGM Press.